BAB 17

SISTEM ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA

SETIAP organisasi, apakah itu organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau tidak, atau organisasi sosial politik, kesemuanya sudah barang tentu dalam kiprahnya untuk menjalankan tugas masing-masing organisasi tersebut mempunyai sistem. Hal itu dibutuhkan, karena memudahkan kerja pada setiap lembaga dan hal-hal yang terkait dengan organisasi yang ada.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam, juga memiliki sistem tugas kesehariannya yang berbentuk Lembaga Syuriyah dan Tanfidhiyah. Keanggotaan dalam NU, Dewan Pimpinan dalam NU, dan Perangkat organisasi NU. Inilah pokok-pokok pikiran yang akan dibahas dalam bab ini.

A. Lembaga Syuriyah dan Tanfidhiyah

Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 18 tentang "Kepengurusan" ayat 1 dikatakan, bahwa kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidhiyah.

Mustasyar adalah Pembina, penasehat dan pembimbing kegiatan Nahdatul Ulama (p.8 ayat 2) Ia dibentuk hanya pada tingkat Pengurus Besar, Wilayah dan Cabang (p.8 ayat 5), dengan tugas menyelenggarakan pertemuan setiap kali dianggap perlu, untuk secara kolektif memberikan nasehat kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya dalam rangka menjaga kemurnian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khitthah Nahdliyah dan Islahu dzatil (arbitrase).

Adapun Syuriyah dalam pasal 8 "Kepengurusan" ayat 3 dikatakan, bahwa Syuriyah merupakan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dengan Tugas sebagai berikut:

1. Membahas masalah agama, terutama hal-hal yang terjadi di masyarakat dipandang dari sudut agama.
2. Dalam masalah fatwa hukum agama, pendapat Syuriyah mengikat dan menentukan seluruh tubuh organisasi termasuk pimpinan pelaksana (Pengurus Tanfidhiyah).
3. Menentukan arah kebijaksanaan NU dalam melakukan usaha dan tindakannya untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama.
4. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengernbangkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah, baik dibidang aqidah, syari'ah dan akhlaq/tasawuf.
5. Mengatasi, mendamaikan perselisihan antara warganya dan masyarakat.
6. Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat NU agar pelaksanaan program-program Nahdlatul Ulama berjalan di atas ketentuan Jam'iyah dan agama Islam.
7. Membimbing, mengarahkan dan mengawasi badan-badan otonom yang langsung berada di bawah Syuriyah.
8. Apabila keputusan suatu perangkat NU dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut paham Ahlussunna wal Jama'ah, pengurus Syuriyah atas keputusan hasil rapatnya dapat membatalkan atas langkah perangkat tersebut. Sedangkan Tanfidhiyah sebagaimana dikatakan pada pasal 8 ayat 4 tentang "Kepengurusan", bahwa Tanfidhiyah merupakan pelaksana sehari-hari kegiatan Nahdlatul Ulama. Karena itu, ia berkewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Syuriyah. Tanfidhiyah sebagai pengurus pelaksana lebih menitikberatkan kegi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atannya pada bidang umum, organisasi dan kemasyarakatan. Dengan demikian tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriyah.
2. Melaksanakan program Jam'iyah.
3. Membimbing, mengarahkan, memimpin dan mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyah yang ada di bawahnya.
4. Menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus Syuriyah tentang pelaksanaan tugasnya.
5. Dalam menggerakkan dan mengelola, Pengurus Besar Tanfidhiyah berwenang membentuk team-team kerja tetap atau sementara, membentuk lajnah, lembaga atau badan otonom sesuai dengan kebutuhan.
6. Ketua Umum Pengurus Besar, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Wakil Cabang (MWC) dan Ketua Pengurus Ranting karena jabatannya dapat menghadiri rapat-rapat pengurus Syuriyah sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
7. Pembagian tugas di antara anggota Pengurus Tanfidhiyah diatur dalam peraturan tata kerja.

Demikian tugas masing-masing kepengurusan Nahdlatul Ulama, baik Mustasyar, Syuriyah dan Tanhdhiyah, yang ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan roda kepengurusan Nahdlatul Ulama. Demikian pula, baik Syuriyah maupun Tanfidhiyah dalam melakukan kegiatan selalu melalui jalan musyawarah dan bersama-sama.

Dalam menetapkan rencana kerja Syuriyah dan Tanfidhiyah selalu bersama-sama. Sedangkan dalam pelaksanaan rencana kerja pimpinan berada pada Tanfidhiyah dan Syuriyah bertindak sebagai badan Pengawas.

B. Keanggotaan dalam NU'

Keanggotaan dalam Nahdlatul Ulama (NU) sudah diatur se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian rupa dalam Anggaran Rumah Tangga Bab I pasal 1-6 yang tersusun sebagai berikut:

I. Jenis Keanggotaan

1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, ialah setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam menurut salah satu dari Al-Madzahibul Arba'ah, sudah aqil baliqh, menyetujui asas, aqidah dan tujuan serta sanggup melaksanakan semua keputusan NU.
2. Anggota kehormatan, ialah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada NU, yang telah disetujui penetapannya oleh rapat Pengurus Besar Harian Gabungan.

II. Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Anggota biasa pada dasarnya diterima mulai ranting di tempat tinggalnya.
2. Dalam keadaan khusus anggota yang diterima tidak melalui ranting, pengelolaan administrasinya diserahkan kepada pengurus ranting di tempat tinggalnya, atau ranting terdekat jika tempat tinggalnya belum ada ranting NU.
3. Penerimaan anggota menganut cara aktif yaitu:
   a. Mengajukan permintaan menjadi anggota disertai pernyataan setuju pada asas, aqidah dan tujuan NU secara tertulis atau lisan dan membayar uang pangkal Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).
   b. Apabila permintaan itu diluluskan, maka selama 6 (enam) bulan yang bersangkutan menjadi calon anggota dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan NU yang dilaksanakan secara terbuka.
   c. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal yang positif maka ia menjadi anggota penuh dan kepadanya diberikan kartu anggota.
   d. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan yang kuat baik secara syar'i maupun secara orga-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisatoris.

e. Permintaan menjadi anggota yang datangnya dari kaum wanita, diatur oleh Muslimat Nahdlatul Ulama.

4. Anggota kehormatan dapat diterima pada tingkat cabang ke atas.
5. Permintaan menjadikan seseorang dan anggota kehormatan dapat dilakukan melalui pengajuan usul Rapat Pengurus Cabang Harian Gabungan atau Rapat Pengurus Wilayah Harian Gabungan atau oleh 3 (tiga) orang anggota Pengurus Besar Harian Syuriyah dan/atau Tanfidhiyah.
6. Setelah memperoleh persetujuan Pengurus Besar Harian Gabungan, kepadanya diberikan surat pengesahan.

III. Kewajiban Anggota (Pasal 13)

1. Setia tunduk dan taat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
2. Mendukung dan membantu segala langkah NU, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.
3. Memberikan bantuan keuangan kepada NU berupa :
   a. I'anah syahriyah(iuran bulanan) sedikitnya Rp. 100,00 (seratus rupiah).
   b. I'anah sanawiyah (iuran tahunan) sedikitnya Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
4. Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah dan persatuan nasional.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh keputusan-keputusan.

IV. Hak-hak Anggota (Pasal 14)

1 . Menghadiri rapat anggota di rantingnya, mengemukakan Pendapat dan memberikan suara,
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau jabatan lain yang ditetapkan baginya.
3. Menghadiri ceramah, kursus latihan, pengajian dan lain-lain majelis yang diadakan oleh NU.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memberikan peringatan dan koreksi kepadap pengurus dengan cara yang sebaik-baiknya dan dengan tujuan lebih menyempurnakan.
5. Mendapatkan pembelaan dan pelayanan.
6. Mengadakan pembelaan atas keputusan terhadap dirinya.
7. Anggota kehormatan berhak menghadiri rapat pengurus, ceramah, kursus, pengajian, konperensi dan muktamar atas undangan pengurus dan dapat memberikan saran-saran atau pendapatnya.

V. Disiplin Anggota (Pasal 15)

Anggota NU tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi yang mempunyai asas, dan/atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau tujuan atau yang dapat merugikan NU.

VI. Gugurnya Keanggotaan (Pasal 16)

1. Seseorang berhenti dari keanggotaan NU karena permintaan sendiri yang diajukan kepada Pengurus-Ranting secara tertulis, atau apabila dinyatakan secara lisan perlu dengan disaksikan oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Pengurus Ranting.
2. Dipecat, karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama NU ditinjau dari syara', kemaslahatan umum maupun secara organisatoris, dengan Prosedur sebagai berikut :
   a. Pada dasarnya pemecatan dilakukan berdasarkan keputusan rapat Cabang Gabungan Lengkap setelah menerima usul dari Pengurus Ranting berdasarkan rapat Pengurus Ranting Pleno.
   b. Sebelum dipecat anggota yang bersangkutan diberi peringatan oleh pengurus rantingnya.
   c. Apabila setelah waktu 15 (lima belas) hari peringatan itu tidak diperhatikan, maka pengurus cabang dapat menta'lik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(memberhentikan sementara) selama 3 (tiga) bulan.

d. Bilamana dalam jangka waktu ta'lik yang bersangkutan tidak rujuk alal-haq, maka dengan sendirinya gugurlah keanggotaannya.

e. Surat pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota dikeluarkan oleh pengurus cabang bersangkutan atas rapat pengurus cabang-cabang gabungan lengkap. Surat keputusan kemudian diserahkan kepada anggota yang dipecat.

f . Anggota yang dita'likan atau dipecat dapat membela diri dalam suatu konperensi cabang atau naik banding ke pengurus wilayah. Selanujutnya rapat pengurus wilayah harian gabungan dapat mengambil keputusan atas permintaan banding itu.

g. Pengurus besar mempunyai wewenang memecat seorang anggota secara langsung. Surat keputusan pemecatan itu dikirimkan kepada cabang dan anggota yang bersangkutan.

h. Pemecatan kepada seorang anggota yang dilakukan langsung oleh pengurus besar merupakan hasil rapat pengurus besar harian gabungan.

i. Anggota yang dipecat langsung oleh pengurus besar dapat membela cliri dalam Konperensi Besar atau Muktamar.

Dewan Pimpinan Dalam NU

I. Kepengurusan Nahdlatul Ulama

Sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal 8 tentang" Kepengurusan" ayat 1, bahwa kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri atas Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidhiyah. Kemudian ketiga-tiganya (pasal 8 ayat 6) mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam anggaran rumah tangga.

Mustasyar adalah penasehat, Syuriyah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Sedangkan Tanfidhiyah merupakan pelaksana sehari-hari kegiatan Nahdlatul Ulama.

II. Tingkat Kepengurusan

Tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama ini diatur dalam ang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garan dasar Nahdlatul Ulama pasal 9 ayat 1-6, yang berbunyi sebagai berikut.

1. Pengurus Besar untuk tingkat pusat.
2. Pengurus Wilayah untuk tingkat propinsi.
3. Pengurus Cabang untuk tingkat kabupaten atau kotamadya.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang untuk tingkat kecamatan.
5. Pengurus Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan.
6. Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 dipilih dan diangkat atau diberhentikan atas keputusan Muktamar, Konperensi atau Musyawarah anggota disesuaikan dengan tingkat masing-masing.

III. Susunan Kepengurusan (AR NU Bab III)

Dalam susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama sudah diatur sedemikian rupa tingkat kepengurusannya, yaitu mulai dari tingkat Ranting sampai tingkat Pengurus Besar (Pusat). Dan dari masing-masing tingkat kepengurusan tersebut, di bawah ini akan disusun sebagai berikut :

a. Pengurus Besar (Pasal 14).

Pengurus Besar (Pusat) terdiri atas :

1. Mustasyar pengurus besar sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, terdiri dari Mustasyar Aam dan 8 (delapan) Mustasyar.
2. Pengurus besar harian Syuriyah terdiri dari Rois Aam, wakil Rois Aam, beberapa Rois, Katib Aam dan beberapa Katib.
3. Pengurus Besar Pleno Syuriyah terdiri dari Pengurus Besar Harian dan para A'wan ditambah Ketua Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom yang berada di bawah pembinaan langsung Syuriyah.
4. Pengurus Besar Harian Tanfidhiyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris Jendral, beberapa Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara dan Wakil Bendahara.
5. Pengurus Besar Pleno Tanfidhiyah terdiri dari Pengurus Be-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sar Harian ditambah unsur pimpinan Bagian, Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom.

6. Pengurus Besar Harian Gabungan ialah Pengurus Besar Harian Syuriyah bersama Pengurus Be sar Harian Tanfidhiyah.
7. Pengurus Besar Pleno Gabungan ialah Pengurus Besar Pleno Syuriyah bersama Pengurus Besar Pleno Tanfidhiyah.
8. Pengurus Besar Gabungan lengkap ialah Pengurus Besar Pleno Gabungan ditambah Mustasyar.

b. Pengurus Wilayah (Pasal 15)

Pengurus Wilayah (Propinsi) adalah terdiri atas :

1. Mustasyar Pengurus Wilayah, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang tanpa ada Mustasyar Aam.
2. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah terdiri dari Rois, beberapa Wakil Rois, Katib dan beberapa Wakil Katib.
3. Pengurus Wilayah Pleno Syuriyah terdiri dari Pengurus Wilayah Harian Syuriyah dan A'wan ditambah Ketua Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom yang berada di bawah pembinaan langsung Syuriyah.
4. Pengurus Wilayah Harian Pleno Tanfidhiyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
5. Pengurus Wilayah Pleno Tanfidhiyah terdiri dari Pengurus Wilayah Harian Tanfidhiyah ditambah unsur pimpinan Bagian Lajnah, Lembaga dan Badan otonom.
6. Pengurus Wilayah Harian Gabungan ialah Pengurus Besar Harian Syuriyah bersama Pengurus Wilayah Harian Tanfidhiyah.
7. Pengurus Wilayah Pleno Gabungan ialah Pengurus Wilayah Pleno Syuriyah bersama dengan Pengurus Wilayah Pleno Tanfidhiyah.
8. Pengurus Wilayah Gabungan Lengkap ialah Pengurus Pleno Gabungan bersama Mustasyar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengurus Cabang (Pasal 16)

Pengurus Cabang (Kabupaten/Kotamadya) terdiri atas :

1. Mustasyar Pengurus Cabang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
2. Pengurus Cabang Syuriyah terdiri dari Rois, beberapa wakil Rois, Katib dan beberapa Katib.
3. Pengurus Cabang Pleno Syuri'yah terdiri dari Pengurus Cabang Harian Syuriyah dan A'wan ditambah Ketua Bagian, Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom yang berada di bawah pembinaan langsung Syuriyah.
4. Pengurus Cabang Harian Tanfidhiyah terdiri, dari Ketua, dua orang wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
5. Pengurus Cabang Pleno Tanfidhiyah terdiri dari Pengurus Cabang Harian ditambah unsur pimpinan Bagian, Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom.
6. Pengurus Cabang Harian Gabungan ialah Pengurus Cabang Harian Syuriyah bersama dengan Pengurus Cabang Harian Tanfidhiyah.
7. Pengurus Cabang Pleno Gabungan ialah Pengurus Cabang Pleno Syuriyah bersama Pengurus Cabang Pleno Tanfidhiyah.
8. Pengurus Cabang Gabungan lengkap ialah Pengurus Cabang Pleno Gabungan ditambah Mustasyar.

d. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) (Pasal 17)

Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) (Kecamatan) terdiri atas:

1. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) Harian Syuriyah terdiri dari Rois, Wakil Rois, Katib dan Wakil Katib.
2. Pengurus MWC Pleno Syuriyah terdiri dari Pengurus MWC Harian ditambah A'wan dan Ketua Lembaga, Lajnah, dan Badan Otonom yang berada di bawah pembinaan langsung Syuriyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengurus MWC HarianTanfidhiyah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.
4. Pengurus MWC Harian Tanfidhiyah terdiri dari Pengurus MCW Harian ditambah unsur pimpinan Bagian, Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom.

e. Pengurus Ranting (Pasal 18)

Pengurus Ranting (Desa/Kelurahan) terdiri atas :

1. Pengurus Ranting Harian Syuriyah terdiri dari Rois, Wakil Rois, Katib dan Wakil Katib.
2. Pengurus Ranting Pleno Syuriyah terdiri dari Pengurus Ranting Harian Syuriyah dan A'wan.
3. Pengurus Ranting Harian Tanfidhiyah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
4. Pengurus Ranting Harian Tanfidhiyah terdiri dari Pengurus Ranting Harian Tanfidhiyah ditambah unsur pimpinan Bagian.
5. Pengurus Ranting Harian Gabungan terdiri dari pengurus Ranting Harian Syuriyah bersama Pengurus Ranting Harian Tanfidhiyah.
6. Pengurus Ranting Pleno Gabungan terdiri dari Pengurus Ranting Syuriyah bersama dengan Pengurus Ranting Pleno Tanfidhiyah.

IV. Masa Jabatan Pengurus (Pasal 19)

1. Masa jabatan Pengurus Besar 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Masa jabatan Pengurus Wilayah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Masa jabatan pengurus cabang 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Masa jabatan pengurus MWC 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
5. Masa jabatan Pengurus Ranting 2 (dua) tahun dan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipilih kembali.

V. Perangkapan Jahatan Pengurus (Pasal 20)

Jabatan pengurus pada suatu tingkat kepengurusan NU tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus pada tingkat kepengurusan yang lain di dalam Jam'iyah NU.

D. Permusyawaratan Dalam Nahdlatul Ulama (NU)

Permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana Sudah disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga tentang "Permusyawatan pasal 26 tentang "Jenis Permusyawaratan" yang meliputi Muktamar, Konperensi Besar Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konperensi dan Rapat Anggota kesemuanya ini akan dijelaskan secara kronologis, sebagai berikut :

a. Muktamar (Pasal 27)

1. Muktamar sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi diselenggarakan oleh Pengurus Besar sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Untuk kelancaran penyelenggaraan Muktamar, Pengurus Besar dapat membentuk Panitia Penyelenggara yang, bertanggung jawab kepada Pengurus Besar.
3. Pengurus Besar membuat Muktamar mencakup juga pengurus baru.
4. Dalam hal pemilihan pengurus maka pengurus syuriyah dipilih oleh Musyawarah Tanfidhiyah dengan terlebih dahulu calon yang akan diajukan untuk dipilih menjadi pengurus Tanfidhiyah mendapat persetuujan dari pengurus Syuriyah terpilih.

b. Konperensi Besar (Pasal 28)

1. Konperensi Besar adalah merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar dan diadakan oleh Pengurus Besar.
2. Konperensi Besar dihadiri oleh anggota Pengurus Besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pleno Gabungan Lengkap dan Utusan Pengurus Wilayah.

3. Konperensi Besar dapat juga diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.
4. Konperensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mu'tamar, mengkaji perkembangan organisasi serta peranannya ditengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemayarakatan.
5. Konperensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Mu'tamar dan tidak memilih Pengurus baru.
6. Konperensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta Konperensi Besar. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai hak I (satu) suara.
7. Konperensi Besar dipimpin oleh Pengurus Besar, acara dan peraturan tata tertib Konperensi Besar disusun oleh Pengurus Besar

c. Musyawarah Nasional Alim Ulama

1. Yang dimaksud dengan Musyawarah Nasional Alim Ulama ialah musyawarah alim ulama , yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Syuriyah, satu kali dalam I (satu) periode kepengurusan.
2. Musyawarah alim ulama yang serupa dapa, juga diselenggarakan oleh Wilayah atau Cabang. sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam l (satu) pereodc
3. Musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh alim ulama Ahlussunnah wal jamaah dari dalam maupun dari luar pengurus NU, terutama ulama Pengasuh Pondok Pesantren dan dapat pula mengundang para tenaga ahli yang diperlukan.
4. Musyawarah Alim Ulama tidak dapat merubah Angga-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Muktamar dan tidak mengadakan pemilihan pengurus baru.

d. Konperensi Wilayah (Pasal 30)

1. Konperensi Wilayah adalah lembaga permusyawaratan tcrtinggi untuk tingkat wilayah, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan utusan Cabang yang ada di daerahnya terdiri dari Syuriyah dan Tanfidhiyahnya.
2. Konperensi Wilayah diselenggarakan atas undangan Pengurus Wilayah atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh jumlah Cabang yang ada di daerahnya.
3. Konperensi Wilayah diselenggarakan sekali dalam (empat) tahun.
4. Konperensi Wilayah membicarakan pertaggungjawaban Pengurus Wilayah, menyusun rencana kerja untuk4 (empat) tahun, memilih Pengurus Wilayah yang baru dan membahas urusan-urusan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di dalam daerah wilayah bersangkutan.
5. Pengurus Wilayah membuat Rancangan Tata Tertib Konperensi, termasuk di dalamnya tata cara pemilihan pengurus baru untuk disahkan oleh Konperensi.
6. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat 1 sampai 5 pasal ini, Pengurus Wilayah sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun mengadakan Musyawarah Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Wilayah, mengkaji perkembangan organisasi dan perannya di tengah masyarakat, membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerja tidak diadakan acara pemilihan Pengurus baru.
7. Konperensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Cabang di daerahnya. Dalam pengambilan keputusan Pengurus Wilayah sebagai satu kesatuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tiap-tiap cabang yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.

e. Konperensi Cabang (Pasal 3l).

1. Konperensi Cabang adalah lembaga permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang, dihadiri oleh utusan-utusan Syuriyah dan Tanfidhiyah, Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Konperensi Cabang diselenggarakan atas undangan Cabang atau atas permintaan sekurang –kurangnya separuh jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting di daerahnya.
3. Konperensi Cabang membicarakan pertanggunngjawaban Pengurus Cabang, menyusun rencana kerja untuk (tiga) tahun, memilih Pengurus Cabang yang baru dan membahas masalah-masalah keagamaan, kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di dalam daerah Cabang yang bersangkutan.
4. Pengurus Cabang membuat Rancangan Tata Tertib Konperensi, termasuk di dalamnya tata cara pemilihan pengurus baru, untuk disahkan oleh konperensi.
5. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat 1 sampai 4 pasal ini, Pengurus Cabang sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya 1 l/2 tahun sekali, mengadakan Musyawarah Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi Cabang, mengkaji perkembangan masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerja tidak diadakan acara pemilihan Pengurus baru.
6. Konperensi Cabang adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Majelis Wakil Cabang dan Ranting didaerahnya. Dalam setiap pengambilan keputusan. Pengurus Cabang sebagai satu kesatuan dan tiap Majelis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Cabang dan Ranting yang hadir mempunyai hak 1 (satu) Suara.

f. Konperensi MWC (Pasal 32)

1. Konperensi Majelis Wakil Cabang adalah lembaga permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Cabang, yang dihadiri oleh utusan-utusan Syuriyah dan Tanfidhiyah Ranting di daerahnya dan diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. Konperensi Majelis Wakil Cabang diselenggarakan atas undangan Pengurus Majelis Cabang atau atas permintaan sekurang-kurang separuh jumlah Ranting di daerahnya.
3. Konperensi Majelis Wakil Cabang membicarakan pertanggungjawaban Pengurus Majlis Wakil Cabang menyusun rencana kerja untuk 2 (dua) memilih Pengurus wakil Cabang yang baru dan membahas urusan-urusan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di dalam daerah Majelis Wakil Cabang.
4. Pengurus MWC membuat Rancangan Tata Tertib Konperensi, termasuk di dalamnya tata cara pemilihan pengurus baru, untuk disahkan oleh konperensi.
5. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat 1 sampai 4 pasal ini, Pengurus MWC sewaktu-waktu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun mengadakan Musyawarah Kerja untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konperensi MWC, mengkaji perkembangan organisasi dan perannya di tengah masyarakat, membahas masalah ke agama dana kemasyarakatan. Dalam Musyawarah Kerja tidak diadakan acara pemilihan pengurus baru.
6. Konperensi Majelis Wakil Cabang adalah sah apabila dihadiri separuh dari jumlah Ranting di daerahnya. Dalam setiap pengambilan keputusan. Pengurus Wakil Ca-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bang sebagai satu kesatuan dan tiap-tiap Ranting yang hadir masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

g. Rapat Anggota (Pasal33).

1. Rapat Anggota adalah lembaga permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting, yang dihadiri oleh anggota-anggota NU di daerah Ranting, dan diselenggarakan selambat-lambatnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. Rapat Anggota diselenggarakan atas undangan Pengurus Ranting atau atas permintaan sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota NU di Ranting bersangkutan.
3. Rapat Anggota membicarakan laporan pertanggungjawaban Pengurus Ranting, menyusun rencana kerja untuk 2 (dua) tahun, memilih Pengurus Ranting yang baru dan membahas urusan-urusan kemasyarakatan pada umumnya terutama yang terjadi di dalam daerah Ranting.
4. Selain ketentuan yang tercantum pada ayat 3 Pengurus Ranting sewaktu-waktmu menganggap perlu dan sekurang-kurangnya sekali setahun mengadakan forum musyawarah pada forum ini tidak dilakukan pemilihan pengurus baru.
5. Rapat Anggota adalah sah apabila dihadiri lebih dari separuh anggota NU di Ranting tersebut. Setiap anggota masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.

E. Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama (NU)

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab II tentang "Perangkat Organisasi" pasal 7, bahwa Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari Bagian, Lajnah, Lembaga dan Badan Otonom.

1. Bagian

a. Bagian adalah alat kelengkapan organisasi yang bertugas membantu Pengurus Harian dalam merumuskan Kebijaksanaan bidang keahlian teknis tertentu sesuai dengan ting-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

katan masing-masing.

b. Pembentukan bagian dalam kepengurusan ditentukan oleh pengurus NU sesuai dengan tingkatan masing-masing.
c. Pembentukan bagian di daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.
d. Yang dimaksud bagian dalam hal ini adalah bagian Ma'arif', bagian Mabarrot, bagian Ekonomi dan bagian da'wah.
e. Jika dianggap perlu pengurus besar dapat membentuk bagian yang belum tersebut pada huruf d.

2. Lajnah

a. Lajnah adalah perangkat organisasi-NU yang berfungsi melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang Karena sifat program tersebut memerlukan penanganan khusus. Lajnah yang ada saat ini adalah *Lajnah Falakiyah*, bertugas mengurus masalah hisab dan ru'yah. *Lajnah Ta'lif wan Nasyr*, bertugas mengurus penulisan karangan (karya iimiah), penerjemahan dan penerbitan buku, kitab serta penerbitan lainnya. *Lajnah Kajian dan Pengembangan sumber daya Manusia*, bertugas melakukan kajian, penelitian dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan serta kualitas warga Nahdlatul ulama. *Lajnah waqfiyah Nahdlatul Ulama*, bertugas menghimpun, mengurus dan mengelola tanah serta bangunan yang diwaqafkan *kepada* Nahdlatul Ulama. *Lajnah Penyuluhan dan Bantuan Hukum*, bertugas memberikan penyuluhan bantuan hukum kepada yang memerlukan. *Lajnah Zakat Infaq dan Shadaqah*, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat, infaq dan shadaqah. *Lajnah Bahtsul Masail* bertugas melaksanakan kajian-kajian dalam musyawarah tentang masalah-masalah waqi'iyah (aktural) dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat secara keseluruhan.

b. Kepengurusan Lajnah di tingkat pusat ditetapkan oleh pe-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngurus besar, sedangkan kepengurusan Lajnah di daerah ditetapkan menurut peraturan Lajnah itu sendiri.

3. Lembaga

a. Lembaga adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan NU, khususnya berkaitan dengan, suatu bidang tertentu. Lembaga yang telah ada pada saat ini adalah, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dibidang penyiaran agama Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal, selain pondok pesantren, Lembaga Sosial Mabaarrot Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang sosial dan kesehatan. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Lembaga Robithah Ma'ahid Islamiyah, bertugas melaksanakan Kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesatren. Lembaga Harian Ta'miril Masjid, bertugas melaksanakan. Kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemakmuran masjid. Lembaga Missi Islam, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dibidang penyiaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah di daerah yang bersifat khusus. Ikatan Seni Hadrah Indonesia, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni hadrah. Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan olahraga bela diri pencak silat. Lembaga kemaslahatan Nahdlatul Ulama, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang kemaslahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, kependudukan dan lingkungan hidup, Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia, bertugas melaksanakan kebijaksanaan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni budaya selain seni hadrah.

b. Kepengurusan Lembaga di tingkat pusat ditetapkan oleh pengurus besar, sedangkan kepengurusan di daerah ditetapkan menurut peraturan lembaga yang bersangkutan.

4. Badan Otonom

a. Badan otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijaksanaan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Badan Otonom yang telah ada pada saat ini adalah Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, Ikatan Putera-puteri Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ahlit Thariqah al - Mu'tabarah Nahdliyah, Jam'iyah Qurra wal Huffadz, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama dan Ikatan Sarjana Indonesia.

b. Kepengurusan badan Otonom diatur menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

c. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas, aqidah dan tujuan usahanya dengan Nahdlatul Ulama.

d. Keputusan kongres badan otonom yang menyangkut anggaran dasar/anggaran rumah tangga harus mendapat persetujuan pengurus besar, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan.

e. Keputusan kongres/konperensi badan otonom yang tidak menyangkut anggaran dasar/anggaran rumah tangga dilaporkan kepada pengurus menurut tingkatannya masing-masing. Pengurus NU tersebut berhak mengadakan perubahan-perubahan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan garis NU. []

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id